



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berprestasi,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

LAPORAN

KINERJA

PANGKALAN PSDKP TUAL

KUARTAL III

TAHUN 2025



Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama triwulan III Tahun 2025 mencapai keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 17 Oktober 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198503162007011006



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan II tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;



8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 indikator kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. NKO yang dicapai pada triwulan III sebesar 104,13 atas 11 indikator kinerja yang dihitung. Berikut kami jabarkan 11 indikator kinerja yang dilaksanakan perhitungan:

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan;
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan;
3. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
4. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
5. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
7. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual;
8. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual;
9. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual;
10. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
11. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Realisasi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 46,27 % atau sebesar Rp **19,206,842,897,-** (*Sembilan belas miliar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **41,512,621,000,-** (*Empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*), dimana terdapat PNPB pada TA. 2025



sebesar Rp**6,603,165,000-** (*Enam miliar enam ratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*), melalui laporan kinerja triwulan III tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11
D. Data Umum Organisasi	12
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	17
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
A. Kegiatan Pengawasan SDKP	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
C. Pengukuran Capaian Kinerja	20
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	21
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025	21
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan	21
B. Analisis Pencapaian Kinerja	23
1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	23
2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	32
3. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	39
4. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	41



5. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	53
6. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	53
C. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran dan Rekomendasi	60



Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada	16
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja	17
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025	19
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025	22
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025	23
Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS	24
Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS	24
Tabel 8 Pengawasan insidental	24
Tabel 9 Capaian IK 4	24
Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK	25
Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut	28
Tabel 12 rekapitulasi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	32
Tabel 13 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha	33
Tabel 14 Capaian IK 5	33
Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan III per lokasi	35
Tabel 16 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan III per bulan	35
Tabel 17 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	36
Tabel 18 Rekap pengawasan budidaya	36
Tabel 19 Rekap pengawasan pengolahan ikan	37
Tabel 20 Rekap pengawasan pemasaran ikan	38
Tabel 21 Capaian IK 8	40
Tabel 22 Capaian IK 9	42
Tabel 23 Rekap penerbitan sanksi administratif non SPKP	44
Tabel 24 Rekap denda administratif hasil analisis SPKP	46
Tabel 25 Rekap penerbitan sanksi administratif SPKP	47
Tabel 26 Rekap sanksi administratif bidang kelautan	50
Tabel 27 Rekapitulasi SPKP	52
Tabel 28 Capaian IK 10	52
Tabel 29 Capaian IK 16	55
Tabel 30 Capaian IK 17	56
Tabel 31 Capaian IK 18	58
Tabel 36 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan III 2025	60



Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual	15
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	15
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual.....	17
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual	21
Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut.....	27
Gambar 6 Pengawasan usaha penangkapan ikan	35
Gambar 7 Pengawasan budidaya.....	36
Gambar 8 Pengawasan pengolahan ikan.....	37
Gambar 9 Pengawasan pemasaran ikan.....	38
Gambar 10 Ekspose penetapan sanksi administratif.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan III, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih terdapat kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- b. Kegiatan *transshipment* yang dilakukan kapal-kapal tidak sesuai mitra yang tercantum pada dokumen perizinan;
- c. Kapal perikanan yang melakukan migrasi perizinan belum sepenuhnya melengkapi armada penangkapan dengan VMS;
- d. Terdapat kapal perikanan yang memiliki perizinan yang tidak sesuai dengan wilayah operasi;



- e. Kegiatan *destructive fishing* baik pengeboman dan pembiusan yang masih sering terjadi serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi;
- f. Sering terjadi kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan kapal ikan Indonesia (KII) di wilayah perairan Papua New Guinea.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik terutama kapal angkut ikan hidup dengan ukuran ≤ 30 GT yang tidak menggunakan VMS;
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyaknya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP;
- b. Terdapat unit usaha yang telah berizin tapi belum melaksanakan aktifitas pengolahan.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom* serta kejadian kapal kandas yang masih sering terjadi di wilayah konservasi
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;



- b) Pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Penyiapan logistik dan pemeliharaan serta operasi kapal pengawas;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

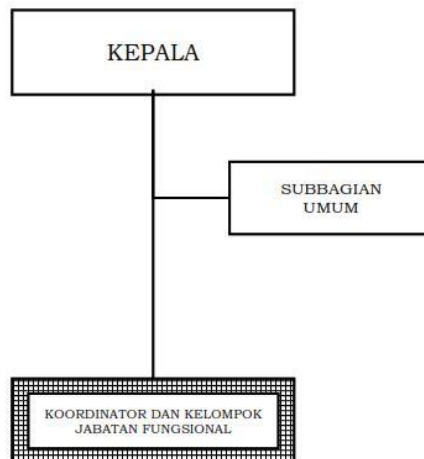
Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk



fungsiional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsiional yang diembannya berdasarkan SK fungsiional yang telah ditetapkan.



STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PSDKP TUAL

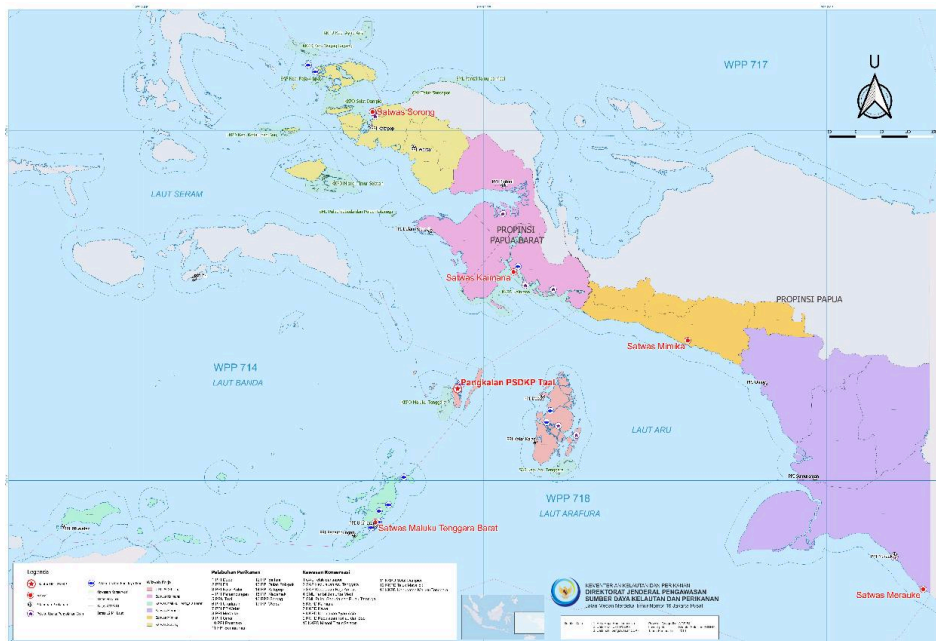


Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 Provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714, WPP 715, WPP 718.

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki satwas dan wilker yang berada dalam kontrol Pangkalan PSDKP sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Pangkalan PSDKP Tual

- Wilker PSDKP Dobo
- Wilker PSDKP Warabal

1) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)

- Wilker PSDKP Kisar

2) Satuan Pengawasan SDKP Sorong

- Wilker PSDKP Sorong Selatan
- Wilker PSDKP Raja Ampat

3) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana

- Wilker PSDKP Fak Fak
- Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
- Wilker PSDKP Avona

4) Satuan Pengawasan SDKP Mimika

5) Satuan Pengawasan SDKP Merauke

- Wilker PSDKP Wanam
- Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan	Kondisi
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika	Siap Operasi
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
8	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal	Siap Terbatas
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB	Siap Operasi
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong	Siap Operasi
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak	Siap Operasi
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual



5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 144 orang, yang terdiri dari PNS Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 79 orang, 41 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 19 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
1	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	25	22	14	61
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	2	4	-	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	-	-	-	-
2	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	7	3	-	10
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	3	-	0	3
3	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	8	1	1	10
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	1	1	0	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	5	2	1	8
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	0	0
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	1	2	1	4
6	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	5	1	0	6
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	KP. Hiu Macan 06	11	4	1	16
8	KP. Hiu 14	8	4	1	13
9	KP. Macan Tutul 01	-	1	-	1
10	Tugas Belajar	3	-	-	3
	Total	79	41	19	144

Sumber: Kepegawaian Sub Bagian Umum Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan Permen KP nomor 35 tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kegiatan Pengawasan SDKP

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);



3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
3.		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
6.		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
8.		10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
13.		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
14.		Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
15.		Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
16.		Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
17.		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
18.		Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
19.		Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
20.		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
21.		Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70

Selama triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan 1 kali revisi perjanjian kinerja pada tanggal 17 Maret 2025 yang merupakan perubahan atas kepala



Pangkalan PSDKP Tual. Perjanjian Kinerja awal maupun revisi Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran I.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).



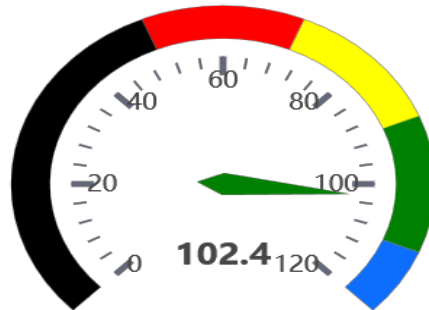
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 10 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 102,4 % untuk triwulan III.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 9 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan

Capaian kinerja triwulan III Tahun 2025 mendapat hasil yang baik dengan NPSK dengan kategori baik dengan perolehan diatas 100%. Capaian triwulan III Pangkalan PSDKP Tual ditabulasikan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2025	Target SEPTEMBER	Capaian SEPTEMBER	%
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	82	0		
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						
IKS.02.1	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
IKS.02.2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan						
IKS.03.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan						
IKS.04.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks) Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						
IKS.05.1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
IKS.05.2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
IKS.06.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	100	100	100	100
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						
IKS.07.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	81	75	81	108
IKS.07.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks) Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	81	75	81	108
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						
IKS.08.1	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	94	75	75	100
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
IKS.09.1	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	71,5	0		
IKS.09.10	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	Nilai	Maximize	70	0		
IKS.09.2	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	92	0		
IKS.09.3	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	81	0		
IKS.09.4	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	86	0		
IKS.09.5	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	100	100	100	100
IKS.09.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	Maximize	95	95	100	105
IKS.09.7	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	88,5	88,5	98,89	112
IKS.09.8	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	80	0		
IKS.09.9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	Inovasi	Maximize	1	0		



Pada triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual dalam aktualisasinya telah melaksanakan penilaian terhadap 11 IK dengan kriteria 8 IK dengan predikat baik, 1 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang triwulan III tahun 2025. Realisasi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 46,27 % atau sebesar Rp. **19,206,842,897,-** (*Sembilan belas milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **41,512,621,000,-** (*empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan III Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU REALISASI	0 0.00%	17,997,404,000 6,844,045,942 (38.03%)	1,366,000,000 103,021,371 (7.54%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	19,363,404,000 6,947,067,313 (35.88%)
		SISA	0	11,153,358,058	1,262,978,629	0	0	0	0	0	0	12,416,336,687
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	256,615,000 30,905,917 (12.04%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	256,615,000 30,905,917 (12.04%)
		SISA	0	225,709,083	0	0	0	0	0	0	0	225,709,083
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,737,869,000 125,721,854 (7.23%)	72,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,809,869,000 125,721,854 (6.95%)
		SISA	0	1,612,147,146	72,000,000	0	0	0	0	0	0	1,684,147,146
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	100,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	100,000,000 (0.00%)
		SISA	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	11,668,752,000 8,765,827,441 (75.12%)	8,130,211,000 3,306,900,822 (40.67%)	183,770,000 30,419,550 (16.55%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	19,982,733,000 12,103,147,813 (60.57%)
		SISA	2,902,924,559	4,823,310,178	153,350,450	0	0	0	0	0	0	7,879,585,187
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	11,668,752,000 8,765,827,441 (75.12%)	28,222,099,000 10,307,574,535 (36.52%)	1,621,770,000 133,440,921 (8.23%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	41,512,621,000 19,206,842,897 (46.27%)
		SISA	2,902,924,559	17,914,524,465	1,488,329,079	0	0	0	0	0	0	22,305,778,103

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Triwulan III Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)".

a. IK 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur



berdasarkan bobot tertentu. Formula dalam menghitung capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dijabarkan sebagai berikut.

$$X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$$

Keterangan:

- X* : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
- a* : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS
- b* : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS
- c* : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pengawasan (30) • Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 8 Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas (7.5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7.5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 9 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100	100	100	100	-



Dari tabel di atas dapat kita lihat jika capaian kinerja untuk IK indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan selama triwulan III telah optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. IK ini merupakan IK baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan IK tahun sebelumnya.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab terutama dalam penentuan luasan wilayah pemanfaatan dalam pengawasan ruang laut;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai;
3. Pendistribusian pengawas kelautan pada beberapa satwas dan wilker.



Sampai dengan triwulan III pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan pada pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil. Realisasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan sebesar 89,35 % atau sebesar Rp 41,944,051 dari total anggaran sebesar Rp 46,944,000 pagu tersedia yang mana jumlah pagu tersebut adalah pagu setelah efisiensi.

Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Unit/Pelaku Usaha Yang Terperiksa PANGKALAN PSDKP TUAL SDK TAHUN 2025						Jumlah Pelaku Usaha		
		KKPN		PWP3K		PRL		Taat	Tidak Taat	Total
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat			
1	Pangkalan PSDKP Tual					2		2	0	2
2	Wilker PSDKP Dobo							0	0	0
3	Satwas PSDKP Sorong				2	4	3	4	5	9
4	Wilker PSDKP Raja Ampat							0	0	0
5	Satwas PSDKP Merauke							0	0	0
6	Satwas PSDKP Kaimana							0	0	0
7	Wilker PSDKP Fak-Fak							0	0	0
8	Satwas PSDKP Mimika							0	0	0
9	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat					1		1	0	1
Jumlah		0	0	0	2	7	3	7	5	12



a.1 Pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.

Pengawasan PRL dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pencapaian kinerja sampai triwulan III Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 4 pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang laut. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar yang wajib dipenuhi selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut sebelum melengkapi perizinan berusaha lainnya. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.



Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut



Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut

NO	SURAT TUGAS	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPR	KETAATAN		URAIAN	REKOMENDASI
					Terbit PKKPR	TAAT	TIDAK TAAT		
1 PANGKALAN PSDKP TUAL									
1	B.2191/PSDKPlan.6/PW.210/VII/2025	29 Juli 2025	Desa Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual	Nama : PT. Samudra Indo Sejahtera Alamat : Jln. Dullah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Prov. Maluku NIB : 8120103840915 KBLI : 52224 – Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : Nomor 24122110518100002 Terbit : 22 Desember 2021 Luas : 13.92 Ha Kedalaman : 8 meter.	Dokumen PKKPR : Nomor 24122110518100002 Terbit : 22 Desember 2021	v		Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. Telah memiliki Dokumen PKKPR dengan Nomor 24122110518100002, terbit 22 Desember 2021 dengan 13.92 Ha dan kedalaman 8 meter. 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh PT. SIS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada dokumen Persetujuan KKPR yang dimiliki	Berdasarkan hasil verifikasi, kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT Samudra Indonesia Sejahtera telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang laut.
2	B.1966/PSDKPlan.6/KP.440/VII/2025	10 Juli 2025	Pulau Ut, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual	Nama : PT. Rajawali Laut Timur Alamat : Desa Rumah Tiga Rt 002/004, Desa/Kelurahan Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku NIB : Kegiatan Usaha : KJA (lok. Pulau Ut) Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : Nomor 08082310518100010 Terbit : 8 Agustus 2023 Luas : 0.05 Ha Kedalaman : 4 meter.	Dokumen PKKPR : Nomor 08082310518100010 Terbit : 8 Agustus 2023	v		Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. Telah memiliki Dokumen PKKPR dengan Nomor 08082310518100010 , terbit 8 Agustus 2023 dengan 0.05 Ha dan kedalaman 4 meter. 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh PT. RLT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada dokumen Persetujuan KKPR yang dimiliki	Berdasarkan hasil verifikasi, kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT Rajawali Laut Timur telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang laut.
2 SATUAN PSDKP MALUKU TENGGARA BARAT									
1	B.800/PSDKPlan.6/KP.440/III/2025	13 Maret 2025	Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.	Nama Pelaku Usaha : PT. Mina Timur Indonesia Nama Penanggungjawab : Claudio Canigia NIB : 9120202111174 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) - KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)- KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) Detail Kegiatan : Dermaga Tambat Labuh Kapal Lokasi : Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR) NPWP : 31.684.434.9-807.001 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Instansi Penerbit : Menteri Investasi dan Kepala BKPM	Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR)	v		Dari hasil inspeksi lapangan saat ini belum ditemukan adanya dugaan terjadinya/pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut karena mengingat Pembangunan dermaga belum selesai dibuat. Pengawasan selanjutnya akan dilakukan pada saat Pembangunan dermaga tambat labuh kapal telah selesai dilakukan.	Disampaikan juga kepada pelaku usaha agar memperhatikan kondisi ekosistem perairan di sekitar dan tidak melakukan kegiatan pencemaran laut yaitu hasil pembuangan sampah/limbah kegiatan Perusahaan.
3 SATUAN PSDKP SORONG									
1.	B.517/PSDKPlan.6/KP.440/II/2025.	20 Februari 2025.	Selat Dampar, Papua Barat	Nama Pelaku Usaha : JULIO FRANCO SUTRISNO NIB : 1803220035271 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 43120 (Penyiapan Lahan) - KBLI 56101 (Restoran)	Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Titik Koordinat :	v		Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha	1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan



				<p>Detail Kegiatan : Rumah Makan dan Dermaga Wisata Lokasi: Selat Dampar, Provinsi Papua Barat. Titik Koordinat : I. 131° 14'48,139" BT - 0°50'53,425" LS II. 131° 14'35,337" BT - 0°51'1,678" LS III. 131° 14'35,644" BT - 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha Skala Usaha : Usaha Kecil Tingkat Resiko : Tinggi NPWP : 94.508.649.4-026.000 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>	<p>I. 131° 14'48,139" BT - 0°50'53,425" LS II. 131° 14'35,337" BT - 0°51'1,678" LS III. 131° 14'35,644" BT - 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha</p>		<p>perorangan Julio Franco Sutrisno sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tidak ditemukan pelanggaran dan kondisi lingkungan disekitar lokasi usaha terpantau baik. 3. Terlambat menyampaikan laporan tahunan periode 2024 dan belum menyampaikan laporan tahunan 2025</p>	<p>reklamasi yang dilakukan didalam zoan diluar kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.</p>
2.	B.548/PSDKPLan.6/KP.440/II/2025.	24 Februari 2025.	<p>Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya</p>	<p>Nama Pelaku Usaha : PT. Papua Resort NIB : 0230000932444 Jenis Kegiatan Usaha : Restoran Detail Kegiatan : Wisata Bahari Lokasi: Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'59,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha Kedalaman : 4 meter. NPWP : 03.082.758.8-951.000 Status Modal : PMA Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>	<p>Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'59,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha</p>	v	<p>Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Papua Resort sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Papua Resort belum membuat laporan tahunan pemanfaatan ruang laut tahun periode 2023 & 2024 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Papua Resort terpantau dalam kondisi baik.</p>	<p>Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT. Papua Resort dihimbau untuk menyampaikan laporan tahunan melalui aplikasi e-sea.kkp.go.id.</p>
3.	B.1134/PSDKPLan.6/KP.440/IV/2025.	24-Apr-25	<p>Papua Barat daya, Kompleks Kek Arar</p>	<p>Nomor PKKPR : 22122310519200001 Nama Pelaku Usaha : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tanggal terbit : 22 Desember 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI : 82920 Kegiatan Usaha : Aktivitas Pengepakan Detail Kegiatan Usaha : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Luas/Panjang : 7,85 Ha Kedalaman : 12 M</p>	<p>Tanggal Penerbitan PKKPR : 22 Desember 2023 PKKPR : 22122310519200001 Luas pemanfaatan : 1,87 Ha</p>	v	<p>Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah membuat laporan tahunan pemanfaatan ruang laut. 3. Kondisi perairan</p>	<p>Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi</p>



Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025

								disekitar lokasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terpantau dalam kondisi baik.	yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
4	B.1366/PSDKPlan.6/KP.440/V/2025.	9 Mei 2025	Jalan Kasuari, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.	Nama : PT. Sagawin Sentosa Maritim Alamat : Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan Suprauw Distrik Maladum Mes Kota Sorong, Prov. Papua Barat Day NPWP : - NIB : 2707230116221 KBLI : 52221 – Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut HP : 081344229999 Email : sagawainsentosamaritim@gmail.com Status Modal : PMDN	TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PKKPR	v		Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Sagawin Sentosa Maritim belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan belum memiliki dokumen perizinan dasar PKKPR ; 2. Luasan ruang laut yang dimanfaatkan menurut hasil inspeksi dilapangan bersama tim dari LPSPL Sorong sekitar 0,79 hektar; 3. Kegiatan Reklamasi diawali oleh perusahaan sebelum PT. Sagawin Sentosa Maritim dan dilanjutkan kembali oleh PT. Sagawin Sentosa Maritim pada tahun 2024. 4. PT. Sagawin Sentosa Maritim terindikasi melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Akan dilakukan Penanganan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sagawin Sentosa Maritim, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5	B.1331/PSDKPlan.6/KP.440/V/2025.	8 Mei 2025	Jl. Pengalengan Klalin 1, Desa/Kelurahan Klabinain, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Nomor PKKPR : 06102310519600002 Nama Pelaku Usaha : PT. Dokindo Aimas Papua Tanggal terbit : 06 Oktober 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI : - Kegiatan Usaha : Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung Detail Kegiatan Usaha : Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal Luas/Panjang : 5,06 Ha Kedalaman : 4 M	Tanggal terbit : 06 Oktober 2023 Nomor PKKPR : 06102310519600002 Luas/Panjang : 5,06 Ha	v		Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 2. PT. Dokindo Aimas Papua telah menyampaikan laporan tahunan pemanfaatan ruang laut. 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Dokindo Aimas Papua terpantau dalam kondisi baik.	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
6	B.2201/PSDKPlan.6/KP.440/VII/2025	31 Juli 2025	Jln. Gurami No 229, Desa/Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Daya	Nama : PT. Klasaman Indah Raya Alamat : Jln. Gurami No 229, Desa/Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Daya NIB : 9120206760135 KBLI : 33151 – Reparasi Kapal,	Dokumen PKKPR : Nomor 06052410519600001 Terbit : 06 Mei 2024 Luas : 0,70 Ha Kedalaman : 7 meter.	v		Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. Telah memiliki Dokumen PKKPR	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut:



Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025

				Perahu dan Bangunan Apung Tingkat Risiko : Menengah Tinggi Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : Nomor 06052410519600001 Terbit : 06 Mei 2024 Luas : 0,70 Ha Kedalaman : 7 meter.				dengan Nomor 06052410519600001, terbit 06 Mei 2024 dengan luas 0,70 Ha dan kedalaman 7 meter. 2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dokumen PKKPR telah dilaksanakan dan tidak ditemukan penambahan kegiatan pemanfaatan ruang laut. 3. Telah melaporkan kegiatan usahanya serta Laporan Tahunan PKKPR pada tanggal 08 Mei 2024.	1. Perlu koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
7	B.2473/PSDKPlan.6/KP.440/VIII/2025	25 Agustus 2025	Jl. Cakalang Komplek Perikanan Sorong, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Nama : PT. Marina Sorong Indonesia Alamat : Jl. Cakalang Komplek Perikanan Sorong, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat NIB: 0220003381609 KBLI : 93249 – Wisata Tirta Lainnya Tingkat Risiko : Menengah Tinggi Status Modal : PMA Dokumen PKKPR : Nomor 03062510519600003 Terbit : 03 Juni 2025 Luas : 0,53 Ha Kedalaman : 6 Meter.	Dokumen PKKPR : Nomor 03062510519600003 Terbit : 03 Juni 2025 Luas : 0,53 Ha Kedalaman : 6 Meter.	v	Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. Telah memiliki Dokumen PKKPR dengan Nomor 03062510519600003, terbit 03 Juni 2025 dengan luas 0,53 Ha dan kedalaman 6 meter. 2. PT Marina Sorong Indonesia belum melaporkan kegiatan usahanya serta Laporan Tahunan PKKPR karena belum memenuhi ketentuan wajib lapor setelah satu tahun sejak penerbitan dokumen PKKPR (terbit 3 Juni 2025) 3. Belum menyampaikan laporan pendirian Bangunan dan instalasi di laut, karena Bangunan dan instalasi di laut yang ada merupakan bangunan yang telah eksisting sejak lama dan telah disampaikan dalam permohonan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut. 4. Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Marina Sorong Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT Marina Sorong Indonesia dihimbau untuk menambah sarana dan prasarana pengelolaan limbah.	



a.2 Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 2 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Kegiatan utama pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil meliputi pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut data pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan.

Tabel 12 rekapitulasi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Jenis	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan	Ada dokumen perizinan	Tidak ada dokumen perizinan	Ya (sesuai pelaksanaan kegiatan)	Tidak (sesuai pelaksanaan kegiatan)
A										
Pangkalan PSDKP Tual (Wilker PSDKP Raja Ampat)										
1	PMDN	PT. Kawei Sejahtera Mining	9 Juni 2025	Raja Ampat	Pertambangan Bijih Nikel	dokumen PKKPRL Nomor 1808231051920001 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2023 dengan luasan 12,99 Ha.	2 (NIB dan PKKPRL)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)	2 (NIB dan PKKPRL)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)
2	PMDN	PT. GAG Nikel	10 Juni 2025	Raja Ampat	Pertambangan Bijih Nikel	dokumen PKKPRL Nomor 2607241051920001 diterbitkan tanggal 26 Juli 2024 dengan luasan 14,77 Ha	2 (NIB dan PKKPRL)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)	2 (NIB dan PKKPRL)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)

2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”. IK ini mengalami perubahan nama akan tetapi mekanisme perhitungannya tetap sama dengan IK tahun sebelumnya.

a. IK 5: Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Formula:

$$x_{riksa} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

Xriksa : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Tabel 13 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindakan lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
<i>Jumlah Nilai</i>		100	

Dalam kurun waktu triwulan III 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW II 2024	TW III 2024
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawasan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:



1. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
2. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
3. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab;
4. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana;
5. Pengawasan terhadap perizinan berusaha telah memanfaatkan teknologi informasi terkini sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran selama triwulan III tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 78,077,803,- atau 81.43 % dari pagu sebesar Rp 95,888,000,-,Pagu tersebut merupakan pagu setelah efisiensi dilaksanakan.

a.1 Pengawasan kapal penangkap ikan

Hingga triwulan III Pangkalan PSDKP Tual belum melaksanakan pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kesesuaian fisik dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan SLO dan selama kurun waktu triwulan III Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 6.213 SLO dan 96 SKP SLO dengan rincian sebagai berikut



Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan III per lokasi

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	197	223	224	37	42	42	2	2	2	236	267	268	100	268	(1)
2	WILKER PSDKP DOBO	653	758	743	376	451	380	1	2	2	1.030	1.211	1.125	93	1.125	86
3	WILKER PSDKP WARABAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SATUAN PSDKP SORONG	344	356	356	2.052	2.059	2.059	535	539	539	2.931	2.954	2.954	100	2.954	-
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	33	34	34	-	-	-	-	-	-	33	34	34	100	34	-
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	180	234	233	502	652	652	-	-	-	682	886	885	100	885	1
8	WILKER PSDKP ASMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	47	46	46	161	145	145	-	-	-	208	191	191	100	191	-
11	WILKER PSDKP FAKFAK	7	7	7	192	204	204	-	-	-	199	211	211	100	211	-
12	WILKER PSDKP WIMRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	181	223	216	49	63	60	109	153	153	339	439	429	98	429	10
14	SATUAN PSDKP MTB	60	52	52	47	64	64	-	-	-	107	116	116	100	116	-
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WILKER PSDKP BENJINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.640	1.933	1.911	3.416	3.680	3.606	647	696	696	5.765	6.309	6.213	98	6.213	96

Tabel 16 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan III per bulan

No	Bulan	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	JANUARI	144	308	304	423	500	489	85	96	96	714	904	889	98,34	889	15
2	FEBRUARI	103	152	150	409	454	438	91	84	84	603	690	672	97,39	672	18
3	MARET	211	183	172	488	372	349	85	73	73	784	628	594	94,59	594	34
4	APRIL	123	154	153	351	467	463	63	80	80	537	701	696	99,29	696	5
5	MEI	206	211	208	355	386	383	50	57	57	611	654	648	99,08	648	6
6	JUNI	187	210	210	287	370	366	45	35	35	519	615	611	99,35	611	4
7	JULI	227	248	248	379	414	410	60	98	98	666	760	756	99,47	756	4
8	AGUSTUS	199	220	220	337	341	332	84	83	83	620	644	635	98,60	635	9
9	SEPTEMBER	240	247	246	387	376	376	84	90	90	711	713	712	99,86	712	1
	JUMLAH	1.640	1.933	1.911	3.416	3.680	3.606	647	696	696	5.765	6.309	6.213	98,48	6.213	96



Gambar 6 Pengawasan usaha penangkapan ikan

Selain pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, Pangkalan PSDKP Tual juga melaksanakan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan. Sampai dengan triwulan III Pangkalan PSDKP Tual baru melaksanakan pengawasan terhadap 2 unit usaha subsektor penangkapan ikan, dan mengakumulasi dengan kegiatan pengawasan di periode triwulan II sebagaimana dapat di pada tabel bawah ini;



Tabel 17 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Penanggungjawab	Lokasi	Jenis	Hasil
1	11/06/2025	PT INDUSTRI PERIKANAN NAMATOTA	Sugondo	Papua Barat	Rutin OSS	Hasil penilaian kepatuhan teknis PT. IPN pada KBLI 03111 dengan nomor kode proyek 202109-1312-0041-3211-483 sebesar 6% (kurang baik). Pada NKP tersebut belum memiliki sarana armada penangkapan ikan dan tidak ada kegiatan penangkapan ikan
2	29/07/2025	PT .TRINADI MINA PERKASA	Purwadi	Kota Tual	Rutin OSS	KM. TMP 56 merupakan kapal penangkap dengan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong. Daerah Penangkapannya ZEEI WPP NRI 718. Hasil Penilaian Kepatuhan Teknis KBLI 03112 sebesar 99 (Baik Sekali). Belum memiliki sertifikat keahlian (Serang, Kelasi, Quality Control, Operator mesin, Oiler dan Juru Masak).
3		PT. INSANI GEMILANG PUALAM	Purwadi	Kota Tual	Rutin OSS	KM. IGP 19 merupakan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dan Daerah Penangkapan Ikan ZEEI WPPNRI 718 Hasil Penilaian Kepatuhan sebesar 99,75 % artinya bahwa kepatuhan teknis usaha, KM. IGP 19 dikategorikan baik sekali. Perwira Quality Control, Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak belum memiliki sertifikat keahlian (hanya memiliki sertifikat BST-Fisheries);

a.2 Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 kepada 3 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental, namun pada triwulan III tidak ada kegiatan pengawasan budidaya perikanan sehingga di akumulasikan (ditambahkan). Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 18 Rekap pengawasan budidaya

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	24/02/2025	PT Yellu Mutiara	Sutrisno Sukendi	Raja Ampat	Insidental	PT. Yellu Mutiara adalah PMDN dengan Skala Usaha Besar dan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dengan persyaratan dasar perizinan berusaha berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPRL) dan persetujuan lingkungan. Agar dipantau proses sertifikasi PKKPRLnya (dalam proses pengurusan) Hasil penilaian kepatuhan teknis KBLI 03215 pembesaran Mollusca Laut sebesar 90 (baik sekali), melakukan kegiatan pembesaran kerang mutiara.
2	16/04/2025	POKDAKAN SIDO MUNCUL	Daud Yusuf	Sorong	Insidental	Usaha budidaya nila belum dilengkapi dengan NIB. Hasil penilaian kepatuhan teknis 75%
3	02/05/2025	PT Dafin Mutiara	Roy Means Djabumir	Tual	Insidental	Usaha pembenihan PT Dafin Mutiara (di Ohoi tahit) belum memiliki CPiB, hasil penilaian kepatuhan teknis 65,2



Gambar 7 Pengawasan budidaya

a.3 Pengawasan kegiatan pengolahan perikanan

Pengawasan terhadap UPI yang dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2025 sebanyak 2 unit usaha dengan di akumulasikan dengan triwulan III data sebagaimana kami jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Rekap pengawasan pengolahan ikan

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	23/04/2025	BONNI TANER	BONNI TANER	KKT	Insidental	usaha pengolahan pengeringan teripang belum dilengkapi dengan SKP, hasil penilaian kepatuhan teknis 50.
2	26/05/2025	PT DWI BINA UTAMA	Achmad Baiquni	Sorong	Rutin OSS	PT DBU telah melakukan kegiatan usaha pengolahan dan distribusi dengan baik.
3	05/06/2025	PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG SORONG	HASMEN	Sorong	Insidental	kegiatan usaha sudah tidak aktif, ditemukan SKP yang telah habis masa berlaku, hasil penilaian kepatuhan teknis 56,5
4	30/06/2025	PT MINA BINTUNI ABADI	FREEDDY RAY SATRIO	Pomako, Timika	Rutin OSS	Perusahaan belum beroperasi karena belum siapnya sarana dan prasarana, serta kurangnya modal usaha.
5	29/07/2025	PT.INSAN GEMILANG PUALAM	PURWADI	KTT	Rutin OSS	KM. IGP 19 merupakan kapal penangkap dengan alat tangkap ppuakat labuh, dengan DPI ZEEI WPP NRI 718. Hasil penilaian kepatuhan teknis KBLI 03111 sebesar 100 (Baik sekali)
6	30/08/2025	PT.BUMI LAUT PERTIWI	SEMINAMUDDIN B		Rutin OSS	Kegiatan PT. Bumi Laut Pertiwi baru mulai beroperasi bulan Juni 2025, telah memiliki SKP dengan produk telur ikan terbang beku, yang di kirim ke Jakarta, melalui ekspedisi Kapal Laut. Hasil penilaian kepatuhan teknis untuk KBLI 10213 pembekuan ikan sebesar 100% dengan kategori baik sekali



Gambar 8 Pengawasan pengolahan ikan

a.4 Pengawasan kegiatan pemasaran perikanan

Pengawasan terhadap pemasaran kegiatan perikanan yang dilaksanakan hingga triwulan III sebanyak 2 unit tahun 2025 data sebagaimana kami jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 20 Rekap pengawasan pemasaran ikan

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	24/04/2025	ANDA TUAL OCEAN FISHERIES	DIPA TAMTELAHITU	Tual	Rutin OSS	PT. Anda Tual Ocean Fisheries belum beroperasi karena masih menunggu TCG antara pihak Indonesia dengan China, sehingga KBLI 46206 dengan nomor kode proyek 202211-1811-5655-9093-839 belum aktif/beroperasi. Sarana dan prasarana, tenaga kerja belum ada.
2	24/04/2025	HAI ZHONG BAO	PAN, ZHONGLIN	Saumlaki	Rutin OSS	KBLI 46324 Belum melakukan kegiatan usaha, namun pada saat pengawasan hanya melakukan kegiatan pengolahan secara sederhana. Kegiatan usaha telah memenuhi persyaratan dasar usaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai kepatuhan teknis pelaku usaha HAI ZHONG BAO dengan nilai 80 (baik sekali). Yang baru di lakukan adalah kegiatan KBLI 46206 perdagangan besar hasil perikanan



Gambar 9 Pengawasan pemasaran ikan

3. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual". Pada tahun sebelumnya periode pengukuran pada IKU ini dilaksanakan secara tahunan dan pada tahun 2025 dilaksanakan secara triwulan.

a. IK 8: Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pangkalan PSDKP Tual memiliki 2 unit Kapal Pengawas dan 11 unit speedboat pengawasan yang dirawat dengan ketentuan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

Formula:

$$Xp = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

Xp = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat



Tabel 21 Capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	100	100	100	100	-



Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian yang baik dengan melaksanakan perawatan baik preventif, prediktif, maupun darurat dengan baik dan dibuktikan realisasi atas kebutuhan perawatan serta adanya pelaporan tentang kegiatan perawatan yang dilakukan. Capaian maksimal pada IKU ini dikarenakan beberapa **analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring terhadap seluruh kebutuhan dan kesiapan operasi armada baik di Pangkalan PSDKP Tual maupun yang tersebar pada satwas dan wilker serta melaksanakan upaya perawatan dengan skala prioritas dan mengatur kebutuhan penganggarannya sehingga perawatan armada dapat dijalankan secara merata;
2. Adanya evaluasi terhadap kondisi armada yang telah dilaksanakan perawatan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan evaluasi melalui capaian kegiatan PN bersama sesditjen PSDKP. Kegiatan evaluasi secara internal akan menguatkan kegiatan perawatan dikarenakan akan berdampak pada capaian hari ops dan kinerja armada sedangkan evaluasi ditingkat sesditjen akan memacu percepatan kegiatan perawatan apabila terdapat kerusakan karena data akan disandingkan dengan seluruh UPT lingkup ditjen PSDKP.

Realisasi atas kegiatan perawatan armada sebesar Rp 1,504,601,789 atau sebesar 85 % dari total pagu existing sebesar Rp1.770.194.000,-. **Analisa kegiatan yang menunjang** IK ini adalah perencanaan. Kegiatan perencanaan harus dilakukan dengan tepat mengingat kegiatan perawatan dapat bersifat darurat dan posisi Pangkalan PSDKP Tual yang relatif jauh dengan penyedia *spare part* dan teknisi serta kondisi kapal maupun speedboat tersebar diseluruh wilayah kerja.

4. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. IK 9: Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan



Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP dan pelanggaran perizinan berusaha dibidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah.

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

dengan kriteria indeks

<i>PERSENTASE</i>	<i>NILAI INDEKS MAKS</i>	<i>KRITERIA INDEKS</i>
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 81 atas IK ini berdasarkan perhitungan di atas. Total pangkalan PSDKP Tual memperoleh 154 kasus perikanan non SPKP, 22 kasus kelautan dan 132 kasus SPKP, dengan perolehan denda administratif sebesar Rp 1.261.849.480 dengan rincian, denda administratif dari pengawasan perikanan non SPKP sebesar Rp,868.831.000 pengawasan tindak lanjut Analisa SPKP sebesar Rp 365.633.600 dan dari pengawasan kelautan sebesar Rp.27.384.880

Tabel 22 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW II 2024	TW III 2024
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	154	81	81	81	80



Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Mempelajari modus-modus terkini dalam pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;
5. Melaksanakan proses BAP secara efisien dan akurat.

Analisa kegiatan yang menunjang

1. Metode ekspose eksternal yang melibatkan berbagai pihak sehingga penetapan sanksi lebih valid dan terukur;
2. pengumpulan data pengawasan yang kredibel sehingga bukti awal dapat dikembangkan hingga adanya penetapan denda.

Realisasi anggaran yang diserap selama triwulan III terhadap kegiatan ini sebesar Rp 29.809,000,- (94,04%) dari jumlah pagu setelah efisiensi sebesar Rp 2.999,000,-.



Tabel 23 Rekap penerapan sanksi administratif non SPKP

No.	Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan				
		Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MAHATAN ARUJAYA 21 (250)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	JAFAR MUADIS	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.124/DJPSDKP/PW.110/II/2025 & B.349/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	07-Feb-25	118,800,000	07-Feb-25
2	KUSUMA 109 (GT. 236)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	WELM HURSEPUNY	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.125/DJPSDKP/PW.110/II/2025 & B.349/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	07-Feb-25	112,147,200	07-Feb-25
3	ANGELINA 66 (GT. 56)	PT. SAMUDRA SENTOSA GEMILANG	Pemilik	HUNG SENG	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.146/DJPSDKP/PW.110/II/2025	13-Feb-25	17,024,000	14-Feb-25
4	TIRTA JAYA MANDIRI (GT. 29)	SIM ENG	Pemilik	SAMSI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	SP1	B.377/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	11-Feb-25	-	-
5	JALA SUKSES MANDIRI (GT. 75)	PT. JALA KARYA LAUTAN ABADI	Pemilik	SUYANTO	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.159/DJPSDKP/PW.110/II/2025	18-Feb-25	38,040,000	20-Feb-25
6	KARYA SAMUDRA (GT. 169)	YUSDI/SAMUDRA BINTANG JAYA KARIMUN, PT	Pemilik	MARTIN	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.550/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	24-Feb-25	-	-
7	DEWI FORTUNA (GT. 59)	ANG TIJI SIONG	Pemilik	ADI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. SSG 66 (GT.491) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.760/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	07-Mar-25	-	-
8	MAKMUR JAYA 8 (GT. 59)	HERRY YANTO	Pemilik	WAHYUDI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.221/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11-Mar-25	12,036,000	13-Mar-25
9	HARLANDO PRATAMA 3 (GT. 153)	MITRA JAYAMAHE NUSANTARA, PT	Pemilik	KAMITO	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.224/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	39,474,000	13-Mar-25
10	BINTANG SUMBER REJEKI (GT. 124)	SINAR MENTARI BAHARI, PT	Pemilik	SAKIR	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.216/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25,296,000	13-Mar-25
11	LAUTAN BERLIAN (GT. 58)	ANITA	Pemilik	MUH. SAEFUL IRFAN	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.225/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	14,964,000	13-Mar-25
12	SINAR MENTARI - IX (GT. 98)	DENI ASTRIANTO	Pemilik	TAUFIK RAMLI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.220/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19,788,000	13-Mar-25
13	MAKMUR JAYA 98 (GT. 98)	HERRY YANTO	Pemilik	SLAMET PRIBADI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.222/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19,992,000	13-Mar-25
14	SINAR MENTARI - 8 (GT. 97)	DENI ASTRIANTO	Pemilik	YASKURI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.219/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19,584,000	13-Mar-25
15			Pemilik			-	Melakukan alih	Denda Administratif	B.217/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25,026,000	13-Mar-25

Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025



	UNION - II (GT. 97)	SINAR MENTARI BAHARI, PT		WAHJUL HAKIM	Pangkalan PSDKP Tual		muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha						
16	FAJAR NELAYAN (GT. 150)	HERMAN SANTOSO TJAHAYA	Pemilik	SLAMET	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.223/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	30,600,000	13-Mar-25	
17	MENTARI ANUGRAH SELATAN (GT. 82)	MENTARI ANUGRAH SELATAN, PT	Pemilik	RIKAM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.218/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	16,728,000	13-Mar-25	
18	MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298)	MATAHARI SUKSES ABADI, PT	Pemilik	DWI SUTARTO	Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.786/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	10-Mar-25	-	-	
19	BAHARI ANUGERAH (GT. 166)	LAUTAN BAHARI SEJAHTERA, PT	Pemilik	TOKHARI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. APEL MERAH 2 (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.226/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	33,864,000	13-Mar-25	
20	APEL MERAH 2 (GT. 298)	HARDI SUSANTO	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari KM. BAHARI ANUGERAH (GT. 166) yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.789/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	10-Mar-25	-	-	
21	JAYA UTAMA 66 (GT. 243)	AMUDRA SENTOSA GEMILANG, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Merauke	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari KM. VICTORY - V (GT. 46) yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1395/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	08-May-25	-	-	
22	VICTORY - V (GT. 46)	ARNESH SAMUDRA JAYA, PT	Pemilik	SUDARMAN	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Merauke	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM. JAYA UTAMA 66 (GT. 243) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1393/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	08-May-25	-	-	
23	SURJA REDJEKI (GT. 165)	RATNAWATI	Pemilik	NUR ZAMAN	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	KP HIU MACAN 14	Melakukan kegiatan alih muat ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya serta tidak dilengkapi Berita Acara Alih Muat Ikan sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.444/DJPSDKP/PW.470/VI/2025	03-Jun-25	184,470,000	04-Jun-25	
24	HORISON (GT. 277)	RAJA JAYA SELALU, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1638/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03-Jun-25	-	-	
25	BERKAH SAMUDRA C (GT. 243)	BERKAH SAMUDRA GROUP, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1637/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03-Jun-25	-	-	
26	BERKAH BERLIAN (GT. 249)	PUTRA MINA BERLIAN, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1636/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03-Jun-25	-	-	
27	IIS BAHARI (GT. 15)	HAMZAH	Pemilik	ALWIN	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Sorong	KP. ORCA 04	Melakukan kegiatan pengangkutan ikan di Perairan Samudera Pasifik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku	SP1	B.2002/PSDKPlan.6/PW.110/VII/2025	10-Jul-25	-	-	
28	PARIS 01	SUPARNO	Pemilik	ISMAIL ARIF BAKAR	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Sorong	KP. ORCA 04	melakukan kegiatan perikanan di Perairan Samudera Pasifik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku.	Paksaan Pemerintah	B.2003/PSDKPlan.6/PW.110/VII/2025	10-Jul-25	-	-	
29	BINTANG CAHAYA TERANG (GT. 119)	FORTUN BERKAH SAMUDRA, PT	Pemilik	SUKARDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (transshipment) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.522/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	08-Jul-25	29,702,400	04-Jun-25	
30	KM. BERKAH MELIMPAH - II (GT.197)	BERKAH MELIMPAH JAYA, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1958/PSDKPlan.6/PW.110/VII/2025	07-Jul-25	-	-	
31	KM. BAHARI - 28 (GT. 149)	HASANAN	Pemilik	Hartono	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (transshipment) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.540/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	11-Jul-25	13,946,400	14-Jul-25	
32	KM BAHARI - 99 (GT. 172)	SUSANTO	Pemilik	Su Han	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (transshipment) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.541/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	11-Jul-25	16,099,200	14-Jul-25	
33			Pemilik	-		-	melakukan alih	SP1	B.2024/PSDKPlan.6/PW.110/VII/2025	14-Jul-25	-	=	

Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	KM. PERMATA MARINDO JAYA 99 (GT. 242)	PERMATA MARINDO JAYA, PT			Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo		muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha					
34	KM. SIDO MULYO 04 (GT. 149)	SUDADI	Pemilik	SURAHMANTO	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Mimika	-	Melakukan kegiatan alih muat (<i>transshipment</i>) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.580/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	25-Jul-25	13,559,000	30-Jul-25
35	KM. ASIA MAKMUR REJEKI 07 (GT. 242)	ASIA MAKMUR REJEKI, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Mimika	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.2108/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	21-Jul-25	-	-
36	INDO LAUTAN SAKTI - 6	INDO LAUTAN SAKTI, PT	Pemilik	MISIANUS SANDIRI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (<i>transshipment</i>) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.567/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	22-Jul-25	43,180,800	23-Jul-25
37	BANGKA JAYA 9	LAUTAN TIMUR MAKMUR, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.2106/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	21-Jul-25	-	-
38	ANGKASA 88 (GT. 95)	LE GUAT	Pemilik	FRANKY	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (<i>transshipment</i>) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.634/DJPSDKP/PW.470/VIII/2025	13-Aug-25	24,510,000	19-Aug-25
39	MITRA PRIMA SAMUDERA I (GT. 258)	TOMI ABADI DIESEL, PT	Pemilik	-	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP2	B.2312/PSDKPLan.6/PW.110/VIII/2025	07-Aug-25	-	-
40	BINTANG TIMUR LAUT	FORTUN LAUT MELIMPAP, PT	Pemilik	ROKHMAT	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	KP. BARAKUDA 02	melakukan penangkapan tidak sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan pada Perizinan Berusaha	SP1	B.2304/PSDKPLan.6/PW.110/VIII/2025	07-Aug-25	-	-
Total											868,831,000	

Tabel 24 Rekap denda administratif hasil analisis SPKP

No.	Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran			Proses Penanganan			
		Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Tanggal Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	REZEKI ABADI (GT. 79)	REJEKI SAMUDERA MAKMUR, PT	Pemilik	SUANDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan penangkapan di jalur penangkapan ikan II sekitar Pulau Dolak Laut Arafuru WPPNRI 718 yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.92/DJPSDKP/PW.340/I/2025	31-Jan-25	-	05-Feb-25	
2	BAHARI INDAH VI	SOFIAN	Pemilik	KIE	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment ikan di laut ke KM Mitra Prima Samudera yang bukan mitranya dan tidak dilengkapi BA Alih Muat/Transshipment sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.294/DJPSDKP/PW.470/IV/2025	23-Apr-25	19,992,000	25-Apr-25	
3	WITA MAKMUR	ABDUL RAHMAN WILLY	Pemilik	NAROWI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan penangkapan ikan di negara lain (poaching), arena terpantau beroperasi di Perairan Papua New Guinea yang tidak sesuai dengan SIPI yang berlaku	Denda Administratif	B.838/DJPSDKP/PW.470/IX/2025	23-Sep-25	127,296,000	25-Sep-25	
4	BAHARI 6	PAHALA BAHARI BALI, PT	Pemilik	KARSIM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan penangkapan ikan di negara lain (poaching), arena terpantau beroperasi di Perairan Papua New Guinea yang tidak sesuai dengan SIPI yang berlaku	Denda Administratif	B.844/DJPSDKP/PW.470/IX/2025	24-Sep-25	116,416,000	26-Sep-25	
5	BAHARI - 98	PAHALA BAHARI BAU, PT	Pemilik	KAHARUDIN	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan penangkapan ikan di negara lain (poaching), arena terpantau beroperasi di Perairan Papua New Guinea yang tidak sesuai dengan SIPI yang berlaku	Denda Administratif	B.845/DJPSDKP/PW.470/IX/2025	24-Sep-25	72,352,000	26-Sep-25	
TOTAL											365,633,600		



Tabel 25 Rekap pengenalan sanksi administratif SPKP

No	Tanggal	Nomor	Dokumen Pelaporan	Objek Pelaporan	Pelanggaran
1	21/01/2025	B.181/PSDKP.Lan.6/PW.110/I/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 418 / FMC / VII / 2024	Kapal Indonesia PUTRA KENCANA - VIII NO Buku Kapal 2572	Beroperasi Dekat Garis Pantai
2	06/02/2025	B.331/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 066 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH-I NO Buku Kapal 2092	Pelanggaran DPI
3	06/02/2025	B.330/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 067 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 1 NO Buku Kapal 10226	Pelanggaran DPI
4	13/02/2025	B.399/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 108 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SUMBER BERKAH NO Buku Kapal 6773	Pelanggaran DPI
5	13/02/2025	B.400/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 110 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 8 NO Buku Kapal 10364	Pelanggaran DPI
6	13/02/2025	B.396/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 085 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH - 5 NO Buku Kapal 8063	Pelanggaran DPI
7	14/02/2025	B.444/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 19 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia VICTORY - V NO Buku Kapal 7558	Beroperasi Dekat Garis Pantai
8	14/02/2025	B.445/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 034 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MARIS - III NO Buku Kapal 7553	Beroperasi Dekat Garis Pantai
9	11/02/2025	B.377/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: LAN6B2500117	Kapal Indonesia Ilegal TIRTA JAYA MANDIRI Tanda Selar TB. KARIMUN/GT.29 No.2983/GGe	Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha
10	19/02/2025	B.499/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 311 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PUTRA BAHARI PRATAMA - 121 NO Buku Kapal 5126	Pelanggaran DPI
11	19/02/2025	B.504/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 079 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia TIEN SUDARMO - 01 NO Buku Kapal 8359	Beroperasi Dekat Garis Pantai
12	21/02/2025	B.541/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 268 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia DYNASTI MAKMUR - IA NO Buku Kapal 2573	Pelanggaran DPI
13	24/02/2025	B.550/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: LAN6B2500129	Kapal Indonesia KARYA SAMUDRA Tanda Selar A000740	Pelanggaran atas kewajiban kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha
14	24/02/2025	B.551/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 251 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia HASIL ANUGRAH MINA NO Buku Kapal 8199	Pelanggaran DPI
15	24/02/2025	B.553/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 295 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MARCEL JAYA 57 NO Buku Kapal 7088	Pelanggaran DPI
16	24/02/2025	B.559/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 082 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia KARYA BAHARI SEJAHTERA NO Buku Kapal 10607	Masuk Zona Konservasi
17	24/02/2025	B.560/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 162 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia JASA MINA PERSADA NO Buku Kapal 914	Beroperasi Dekat Garis Pantai
18	26/02/2025	B.608/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 297 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BAHARI INDAH - VI NO Buku Kapal 7533	Pelanggaran DPI
19	26/02/2025	B.609/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 244 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - VII NO Buku Kapal 1723	Pelanggaran DPI
20	26/02/2025	B.610/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 288 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - 85 NO Buku Kapal 5316	Pelanggaran DPI
21	26/02/2025	B.611/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 287 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia AGUNG MAKMUR - 168 NO Buku Kapal 5128	Pelanggaran DPI
22	27/02/2025	B.631/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 271 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SUMBER JAYA - 28 NO Buku Kapal 2734	Pelanggaran DPI
23	27/02/2025	B.632/PSDKP.Lan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 0041 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia DUTA BAHARI - III NO Buku Kapal 7654	Pelanggaran Pelabuhan
24	05/03/2025	B.729/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 163 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Beroperasi Dekat Garis Pantai
25	05/03/2025	B.729/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 336 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Pelanggaran DPI
26	03/03/2025	B.691/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 215 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MINA UTAMA NO Buku Kapal 1901	Pelanggaran DPI
27	05/03/2025	B.732/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 257 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia KARYA INDAH 308 NO Buku Kapal 16968	Pelanggaran DPI
28	06/03/2025	B.750/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 253 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia STARINDO PRIMA NO Buku Kapal 19640	Pelanggaran DPI
29	07/03/2025	B.760/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: LAN6B2500152	Kapal Indonesia DEWI FORTUNA Tanda Selar A001850	Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha
30	10/03/2025	B.786/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: LAN6B2500131	Kapal Indonesia MATAHARI SUKSES 7A Tanda Selar A010586	Pelanggaran atas kewajiban kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha
31	13/03/2025	B.843/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 353 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR 3 NO Buku Kapal 10283	Pelanggaran DPI
32	13/03/2025	B.836/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 281 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PHOTERI NO Buku Kapal 3591	Pelanggaran DPI
33	13/03/2025	B.837/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 334 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia VICTORY BARU NO Buku Kapal 3997	Pelanggaran DPI
34	13/03/2025	B.838/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 367 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR I NO Buku Kapal 9851	Pelanggaran DPI
35	13/03/2025	B.838/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 264 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia HARAPAN JAYA MAJU NO Buku Kapal 1720	Pelanggaran DPI
36	13/03/2025	B.839/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 098 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia ADI JAYA 04 NO Buku Kapal 7765	Beroperasi Dekat Garis Pantai
37	10/03/2025	B.789/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: LAN6B2500209	Kapal Indonesia APEL MERAH 2 Tanda Selar A006733	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
38	17/03/2025	B.867/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 292 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MUARA INDAH - 3 NO Buku Kapal 6026	Pelanggaran DPI
39	17/03/2025	B.868/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 083 / FMC / VIII / 2024	Kapal Indonesia DINASTI MAKMUR - 03 NO Buku Kapal 6347	Beroperasi Dekat Garis Pantai
40	17/03/2025	B.875/PSDKP.Lan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 376 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia AL BAROAH 03 NO Buku Kapal 11126	Pelanggaran Pelabuhan



41	17/03/2025	B.877/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 285 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia JAYA MULIA NO Buku Kapal 4739	Pelanggaran DPI
42	17/03/2025	B.878/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 360 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 87 NO Buku Kapal 7481	Pelanggaran DPI
43	17/03/2025	B.876/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 296 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia DINASTI KARIMUN 18 NO Buku Kapal 7332	Pelanggaran DPI
44	21/03/2025	B.928/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 300 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia TEGUH MULYA NO Buku Kapal 9823	Pelanggaran Pelabuhan
45	27/03/2025	B.977/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 058 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PANCA EMAS NO Buku Kapal 1225	Beroperasi Dekat Garis Pantai
46	27/03/2025	B.978/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 397 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 268 NO Buku Kapal 10695	Pelanggaran DPI
47	27/03/2025	B.979/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 008 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SOYO MANDIRI NEW 01 NO Buku Kapal 12080	Beroperasi Dekat Garis Pantai
48	27/03/2025	B.980/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 280 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia DINASTI MAKMUR NO Buku Kapal 9593	Pelanggaran DPI
49	17/04/2025	B.1115/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 283 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MINA HARAPAN JAYA NO Buku Kapal 4289	Pelanggaran DPI
50	17/04/2025	B.1102/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 145 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BINTANG INDAH NO Buku Kapal 2674	Beroperasi Dekat Garis Pantai
51	17/04/2025	B.1119/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 313 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia STAR DOLPHIN NO Buku Kapal 1177	Pelanggaran DPI
52	17/04/2025	B.1120/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 094 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia MINA SAMUDERA-03 NO Buku Kapal 10953	Pelanggaran Pelabuhan
53	23/04/2025	B.1165/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 286 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia HASIL ANUGRAH MINA NO Buku Kapal 8199	Pelanggaran DPI
54	24/04/2025	B.1187/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 422 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia CAHYA REJEKI NO Buku Kapal 8107	Pelanggaran Pelabuhan
55	28/04/2025	B.1228/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 433 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BERKAH MINA BAROKAH NO Buku Kapal 10229	Beroperasi Dekat Garis Pantai
56	29/04/2025	B.1247/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 110 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia SINAR CAKRA BUANA 06 NO Buku Kapal 12751	Beroperasi Dekat Garis Pantai
57	30/04/2025	B.1275/PSDKPlan.6/PW.110/IV/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 385 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia IMMANUEL ME NO Buku Kapal 6351	Beroperasi Dekat Garis Pantai
58	02/05/2025	B.1294/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 371 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MAKMUR MANDIRI NO Buku Kapal 10152	Beroperasi Dekat Garis Pantai
59	02/05/2025	B.1295/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 423 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia NALENDRA MINA WIJAYA NO Buku Kapal 13836	Beroperasi Dekat Garis Pantai
60	05/05/2025	B.1345/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 038 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MAS BERLIAN NO Buku Kapal 14731	Pelanggaran Pelabuhan
61	06/05/2025	B.1352/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 032 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia POLLY 15 NO Buku Kapal 12035	Beroperasi Dekat Garis Pantai
62	13/03/2025	B.793/PSDKPLAN.3/PW.320/III/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 312 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MITRA PRIMA SAMUDERA I NO Buku Kapal 10547	Alih Muat antar Kapal
63	06/05/2025	B.1355/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 167 / FMC / IV / 2025	Kapal Indonesia TSM 77 NO Buku Kapal 10570	Masuk Zona Konservasi
64	08/05/2025	B.1395/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: MRK.A2500128	Kapal Indonesia JAYA UTAMA 66 Tanda Selar 010398	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
65	09/05/2025	B.1409/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 012 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia ISSO PUTRI 02 NO Buku Kapal 10713	Masuk Zona Konservasi
66	08/05/2025	B.1393/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD NO: MRK.A2500128	Kapal Indonesia VICTORY - V Tanda Selar 7558	Alih muat ikan (transhipment) kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
67	09/05/2025	B.1416/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 015 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia VICTORY - III NO Buku Kapal 7559	Masuk Zona Konservasi
68	14/05/2025	B.1431/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 059 / FMC / IV / 2025	Kapal Indonesia MARIS - II NO Buku Kapal 7554	Beroperasi Dekat Garis Pantai
69	14/05/2025	B.1432/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 016 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MARGANA SAKTI - II NO Buku Kapal 1207	Masuk Zona Konservasi
70	27/02/2025	B.632/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 041 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia DUTA BAHARI - III NO Buku Kapal 7654	Beroperasi Dekat Garis Pantai
71	19/02/2025	B.506/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 425 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PRIMA UTAMA JAYA - I NO Buku Kapal 8306	Beroperasi Dekat Garis Pantai
72	14/05/2025	B.1433/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 164 / FMC / III / 2025	Kapal Indonesia TROPIKA JAYA NO Buku Kapal 1209	Masuk Zona Konservasi
73	22/05/2025	B.1504/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 095 / FMC / II / 2025	Kapal Indonesia BINTANG BAHAGIA 8 NO Buku Kapal 6067	Masuk Zona Konservasi
74	03/06/2025	B.1638/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	Laporan Kejadian No LK B.164b/PSDKPlan.6-Hiu 14/PW.353/VI/2025	Kapal Indonesia HORIZON Tanda Selar A006380	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
75	03/06/2025	B.1637/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	Laporan Kejadian No LK B.164b/PSDKPlan.6-Hiu 14/PW.353/VI/2025	Kapal Indonesia BERKAH SAMUDRA C Tanda Selar A017449	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
76	03/06/2025	B.1636/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	Laporan Kejadian No LK B.164b/PSDKPlan.6-Hiu 14/PW.353/VI/2025	Kapal Indonesia BERKAH BERLIAN Tanda Selar 10720	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
77	02/06/2025	B.1590/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA NIB 9120314200234	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
78	02/06/2025	B.1591/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT SAMUDERA INDO SEJAHTERA NIB 8120103840915	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
79	02/06/2025	B.1592/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT BAGUS JAYA ABADI Kab/Kota SORONG	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
80	02/06/2025	B.1593/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT RAJAWALI LAUT TIMUR NIB 9120200161673	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
81	02/06/2025	B.1595/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Laporan Hasil Pengawasan No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT PERTAMINA PATRA NIAGA NIB 9120309310613	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
82	02/06/2025	B.1596/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT SUMA SARANA Kab/Kota SORONG	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
83	02/06/2025	B.1597/PSDKPlan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT. PAPUA RESORT Kab/Kota Kota Sorong	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,



Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025

84	02/06/2025	B. 1598/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) JULIO FRANCO SUTRISNO NIB 1803220035271	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
85	02/06/2025	B. 1599/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT AMERA NUS Kab/Kota KAIMANA	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
86	02/06/2025	B. 1600/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT PERTAMINA PATRA NIAGA NIB 9120309310613	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
87	02/06/2025	B. 1601/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT AMERA NUS NIB 8120002732305	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
88	02/06/2025	B. 1602/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT KAWEI SEJAHTERA MINING Kab/Kota SORONG	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
89	02/06/2025	B. 1603/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT RAJAWALI LAUT TIMUR NIB 9120200161673	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
90	02/06/2025	B. 1604/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT GOLDEN EKSPORINDO ABADI NIB 811220082089	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
91	02/06/2025	B. 1605/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY NIB 8120004791485	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
92	02/06/2025	B. 1606/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT LAYAR NUSANTARA GAS Kab/Kota SORONG	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
93	02/06/2025	B. 1607/PSDKPLan.6/PW.210/VI/2025	Rekomendasi PPBBR No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Perusahaan (tanpa NIB) PT LAYAR NUSANTARA GAS Kab/Kota SORONG	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
94	19/06/2025	B.1796/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 047 / FMC / V / 2025	Kapal Indonesia PUTRI DUYUNG CS NO Buku Kapal 7105	Beroperasi Dekat Garis Pantai
95	19/06/2025	B.1797/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 092 / FMC / V / 2025	Kapal Indonesia NICO - III NO Buku Kapal 9201	Beroperasi Dekat Garis Pantai
96	24/06/2025	B.1844/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 022 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia INDO LAUTAN SAKTI - 8 NO Buku Kapal 3887	Beroperasi Dekat Garis Pantai
97	21/07/2025	B.2095/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 429 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BINTANG ASIA REJEKI 01 NO Buku Kapal 10761	Beroperasi Dekat Garis Pantai
98	21/07/2025	B.2096/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 328 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia NUSANTARA INDAH - 28 NO Buku Kapal 1272	Pelanggaran DPI
99	21/07/2025	B.2097/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 258 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA 168 NO Buku Kapal 606	Pelanggaran DPI
100	21/07/2025	B.2098/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 269 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - 49 NO Buku Kapal 10722	Pelanggaran DPI
101	21/07/2025	B.2099/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 273 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA 68 NO Buku Kapal 2753	Pelanggaran DPI
102	21/07/2025	B.2100/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 275 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 158 NO Buku Kapal 10606	Pelanggaran DPI
103	21/07/2025	B.2101/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 196 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MAJU BERSAMA II NO Buku Kapal 9941	Pelanggaran DPI
104	21/07/2025	B.2102/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 407 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia PUTRA LEO BAHARI NO Buku Kapal 6793	Beroperasi Dekat Garis Pantai
105	21/07/2025	B.2103/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 246 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MITRA SAMUDERA JAYA 1 NO Buku Kapal 10794	Alih Muat antar Kapal
106	21/07/2025	B.2104/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 420 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia TRI SOYO BAROKAH NO Buku Kapal 6548	Beroperasi Dekat Garis Pantai
107	21/07/2025	B.2104/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 261 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MARCEL JAYA 05 NO Buku Kapal 1270	Pelanggaran DPI
108	10/07/2025	B.2002/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Laporan Kejadian No 085/PSDKP.2-KP. ORCA04/PL.450/VI/2025	Kapal Indonesia IIS BAHARI Kab/Kota A015759	Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha
109	07/07/2025	B.1958/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD No. LANG6250061	Kapal Indonesia BERKAH MELIMPAH - II Kab/Kota 006110	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
110	14/07/2025	B.2024/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD No. LANG62500616	Kapal Indonesia PERMATA MARINDO JAYA 99 Kab/Kota A012092	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
111	21/07/2025	B.2108/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD No. MIM.A2500249	Kapal Indonesia ASIA MAKMUR REJEKI 07 Kab/Kota A011974	Alih muat ikan (transhipment) kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
112	21/07/2025	B.2106/PSDKPLan.6/PW.110/VII/2025	Laporan Hasil Pengawasan No HPKD No. LANG62500682	Kapal Indonesia BANGKA JAYA 9 Kab/Kota 010284	Alih muat ikan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan tidak dalam satu kesatuan usaha
113	07/07/2025	B.1953/PSDKPLan.6/PW.210/VII/2025	Nota Dinas No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) FREEPORT INDONESIA NIB 8120101882585	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
114	07/07/2025	B.1954/PSDKPLan.6/PW.210/VII/2025	Nota Dinas No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) RAJAWALI LAUT TIMUR NIB 9120200161673	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
115	07/07/2025	B.1955/PSDKPLan.6/PW.210/VII/2025	Nota Dinas No B.473/DJPSDKP.4/PW.210/VI/2025	Pelaku Usaha (dengan NIB) RAJAWALI LAUT TIMUR NIB 9120200161673	Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
116	07/08/2025	B.2303/PSDKPLan.6/PW.110/VIII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 185 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BANDAR BAHARI 573 NO Buku Kapal 4485	Beroperasi Dekat Garis Pantai
117	07/08/2025	B.2304/PSDKPLan.6/PW.110/VIII/2025	Laporan Kejadian No 180/PSDKP.2-KP. BARAKUDA02/KP.440/VII/2025	Kapal Indonesia BINTANG TIMUR LAUT NIB A017174	Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha
118	25/08/2025	B.2489/PSDKPLan.6/PW.110/VIII/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 220 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia MERAH DELIMA LAUT INDAH I NO Buku Kapal 13064	Pelanggaran DPI
119	08/09/2025	B.2604/PSDKPLan.6/PW.110/IX/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 276 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia CITRA NUSANTARA 8 NO Buku Kapal 9807	Pelanggaran DPI
120	15/09/2025	B.2658/PSDKPLan.6/PW.110/IX/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 402 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BINTANG MANDIRI B NO Buku Kapal 9806	Alih Muat antar Kapal
121	15/09/2025	B.2659/PSDKPLan.6/PW.110/IX/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 402 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia BINTANG MANDIRI A NO Buku Kapal 9811	Alih Muat antar Kapal
122	17/09/2025	B.2691/PSDKPLan.6/PW.110/IX/2025	Lembar Indikasi Pelanggaran No L - 357 / FMC / I / 2025	Kapal Indonesia KARAOKE - II NO Buku Kapal 2125	Beroperasi Dekat Garis Pantai



Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual TW III 2025

Tabel 26 Rekap sanksi administratif bidang kelautan

NO	NAMA KAPAL/PERUSAHAAN	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF	NILAI DENDA	
1	PT. KLASAMAN INDAH RAYA	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,878 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	Rp16.401.040	
2	PT. SAGAWIN SENTOSA MARITIM	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,588 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	Rp.10.983.840	
3	PT INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	Melakukan pelanggaran berupa tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	SP1		
4	PT SAMUDERA INDO SEJAHTERA				
5	PT BAGUS JAYA ABADI				
6	PT RAJAWALI LAUT TIMUR				
7	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1		
8	PT SUMA SARANA		SP1		
9	PT PAPUA RESORT		SP1		
10	JULIO FRANCO SUTRISNO		SP1		
11	PT AMERA NUS		SP1		
12	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1		
13	PT AMERA NUS		SP1		
14	PT RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1		
15	PT GOLDEN EKSPORINDO ABADI		SP1		
16	PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY		SP1		
17	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1		
18	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1		
19	PT. FREEPORT INDONESIA		SP1		
20	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1		
TOTAL				Rp27.384.880	





Gambar 10 Ekspose penetapan sanksi administratif

b. IK 10: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formulasi :

$$X_{TLH} = \Sigma \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;

x_{1+2+n} : Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2, dan denda administratif) dan bukan pelanggaran

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Hingga triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 27 Rekapitulasi SPKP

UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP	
	TRANSHIPMEN T	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	%	Kriteria indeks (melihat tabel)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tual	5	16	56	64	8	1	0	150	0	150	32	26	2	81	4	5	100%	81
Total	5	16	56	64	8	1	0	150	0	150	32	26	2	81	4	5		

$$X_{TLH} = \sum \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\% = \frac{(81+4+5+26)}{150-32-2} \times 100\% = \frac{116}{116} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka Pangkalan PSDKP tual memperoleh capaian triwulan III sebesar 81 dari target triwulan III yang ditetapkan sebesar 70. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja dimaksud dalam bentuk tabel.

Tabel 28 Capaian IK 10

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW II 2024	TW III 2024
Indeks	Pemeriksaan	Hasil	Analisis	70	81	81	81	80
Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan								

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual memanfaatkan aplikasi online dalam hal ini zoom meeting agar mempermudah proses permintaan keterangan terhadap pemilik yang berdomisili di luar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu (mingguan) terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun berkoordinasi kepada UPT PSDKP lainnya agar proses permintaan keterangan dapat berjalan dengan lancar.



5. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kinerja ini menghasilkan satu indikator kinerja utama yaitu "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan" indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang telah digunakan tahun sebelumnya untuk mengukur capaian kinerja pada kegiatan tindak pidana kelautan dan perikanan akan tetapi pada tahun ini perhitungan akan dilaksanakan setiap triwulan.

a. IK 11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(x_a) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

X_a : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan / atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya, kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit

n : Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual belum menangani kasus TPKP dikarenakan indikator kinerja ini bersifat kasuistik. Kondisi ini secara otomatis membuat capaian akan sama dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 75

6. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja manajerial yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian diantaranya;

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);



2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
3. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks);
4. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
10. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai).

Selama kurun waktu triwulan III Pangkalan PSDKP Tual melakukan penilaian terhadap 5 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu pada point 2, 3, 5, 6, dan 7 sedangkan realisasi seluruh kegiatan dukungan manajemen selama triwulan III sebesar Rp 12,103,147,813,- atau sekitar 60,57 % dari total pagu Rp 19,982,733,000

a. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan



barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian risiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan III tahun 2025** dengan merealisasikan 10 pengendalian risiko dari 10 rencana, dengan perhitungan sebagai berikut

$$X = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dikarenakan seluruh kemungkinan risiko pada setiap tim kerja pada Pangkalan PSDKP Tual telah diidentifikasi, didokumentasikan serta telah diverifikasi dan dinilai sebagaimana surat Sesditjen PSDKP No. B.3923/DJPSDKP.1/OT.710/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 (lampiran III). Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW II 2024	TW III 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan berjalan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut;



- Menyusun risiko dan pencegahan dalam sebuah matriks yang telah disahkan oleh setiap tim kerja.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar eveluasi kegiatan sebelumnya.

b. IK 16: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **75%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$ = Rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Tabel 30 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW II 2024	TW III 2024
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	100%	80%

Selama triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah menyelesaikan 12 tindak lanjut atas 12 rekomendasi yang disampaikan itjen sebagaimana tertuang dalam surat Seditjen PSDKP Nomor 1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (lampiran IV), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$



Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, serta pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

c. **IK 17: Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)**

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan antara lain U1-Persyaratan Layanan⁽¹⁾, U2-Kemudahan Prosedur⁽²⁾, U3-Waktu Penyelesaian⁽³⁾, U4-Kesesuaian Biaya⁽⁴⁾, U5-Kesesuaian Produk⁽⁵⁾, U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas⁽⁶⁾, U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas⁽⁷⁾, U8-Layanan Konsultasi⁽⁸⁾, dan U9-Kualitas Isi/Sarana⁽⁹⁾.

SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pelayanan publik yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Survei kepuasan masyarakat dilakukan kepada 236 pengguna jasa di Pangkalan PSDKP Tual termasuk satwas dan wilker selama kurun waktu



triwulan III dan diperoleh nilai 98,89 dari target 88,5 sebagaimana tertuang dalam surat Sesditjen PSDKP No. 119/PSDKPLan.6/KI.120/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (lampiran V). Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 31 Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024	TW III 2024
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5	88,5	98,89	98,89	100

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman;
3. Keterbukaan informasi terkait prosedur penerbitan ataupun kendala yang mengakibatkan SLO tidak dapat diterbitkan disampaikan dengan baik kepada pengguna jasa.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dala melaksanakan pelayanan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440853/2025 tanggal 12 Desember 2024, mendapat alokasi dana



sebesar Rp 41,512,621,000,- dengan pagu RM sebesar Rp 34,909,456,000,- dan pagu PNBP sebesar Rp 6,603,165,000,- Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki realisasi sebesar Rp 19,206,842,897,- atau 46,27 % berdasarkan data OMSPAN.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan III Tahun 2025, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja dimana 11 diantaranya merupakan IKU dan 10 IKM yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IK triwulan III tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 102,4 % diperoleh terhadap penilaian 11 Indikator Kinerja, 1 IK berpredikat istimewa dan 8 IK lainnya berpredikat baik.

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode triwulan III Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IK pada triwulan III Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 32 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan III 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan percepatan tindak lanjut hasil Analisa SPKP	<ul style="list-style-type: none">• Menugaskan seluruh personal pada satwas maupun wilker dalam kegiatan permintaan keterangan	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan III
2	Melaksanakan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan rapat evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan III



PANGKALAN PSDKP TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Kompleks PPN Tual
Kota Madya Tual Kecamatan Dullah Selatan
Provinsi Maluku - 97611

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara